

Efektifitas Kebijakan Pendidikan Vokasi di Sekolah Kejuruan

Hersanti Arnita¹, Fadriati² 

^{1,2} UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Indonesia

Email: hersantiarnita692@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas kebijakan pendidikan vokasi pada sekolah kejuruan. Kebijakan pendidikan akan berjalan ditempat tanpa adanya dukungan dari lembaga pendidikan. Tingginya jumlah lulusan SMK yang belum bekerja (11,3%) mengguguli lulusan pada tingkat lainnya menjadi permasalahan akan efektifitas pendidikan vokasi/ kejuruan. Kajian pustaka digunakan dalam penelitian ini untuk mengungkap faktor penyebab efektifitas implementasi kebijakan pendidikan vokasi di SMK serta menawarkan solusi atas persoalan tersebut. Temuan mengindikasikan bahwa peran sumber daya manusia (kepala sekolah dan guru) berkontribusi terhadap keberhasilan pendidikan vokasi. Pentingnya optimalisasi kinerja kepala sekolah dan guru agar kebijakan pendidikan vokasi di SMK dapat terlaksana dengan efektif.

Kata Kunci: *Efektifitas, Pendidikan, Vokasi,*

Abstract

This article aims to analyze the effectiveness of vocational education policies in vocational schools. Education policies will run in place without the support of educational institutions. The high number of SMK graduates who are not yet working (11.3%) outperforms graduates at other levels is a problem for the effectiveness of vocational/vocational education. Literature review was used in this research to reveal the factors that cause the effectiveness of the implementation of vocational education policies in Vocational Schools and to offer solutions to these problems. The findings indicate that the role of human resources (principals and teachers) contributes to the success of vocational education. The importance of optimizing the performance of school principals and teachers so that vocational education policies in Vocational Schools can be implemented effectively.

Keywords: *Effectiveness, Education, Vocation*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha yang terencana untuk mencerdaskan generasi bangsa. Karakter masyarakat suatu bangsa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakatnya. Melalui pendidikan, masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pemerintah melalui kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan mampu menganalisis dan merancang pendidikan yang membekali lulusannya agar berpengetahuan yang luas, memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman yang akan ditempuhnya nanti.

Kebijakan pemerintah dengan meningkatkan jumlah SMK dan SMA sebanyak 70 banding 30 persen untuk sepuluh tahun kedepan mengindikasikan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan mampu menjawab permasalahan yang tengah dan akan dihadapi pemerintah dimasa yang akan datang. Salah

satu permasalahan itu adalah meningkatnya indeks pengangguran dan menurunnya perekonomian masyarakat. Sekolah Menengah Kejuruan menjadi sasaran untuk mempersiapkan lulusan yang terampil dan siap mengisi peluang dunia usaha dan dunia industri. Sesuai dengan tujuan khusus pendidikan SMK yang termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan mempersiapkan lulusannya agar mampu mandiri dan produktif dan membekalinya dengan keterampilan sesuai kompetensi keahlian yang dipilih. Dengan demikian, sejatinya Sekolah Menengah Kejuruan merupakan sekolah impian masyarakat, karena lulusannya telah siap memasuki dunia kerja dan dunia industri.

Data dari biro pusat statistik (BPS) menunjukkan bahwa lulusan SMK yang belum bekerja pada tahun 2021 mencapai angka 11,3 %, berada pada tingkat paling tinggi dalam daftar tingkat lulusan lainnya (Kusnandar, 2021). Seharusnya, pendidikan SMK menjadi solusi mengatasi permasalahan pengangguran yang dihadapi negara saat ini. Tidak hanya itu, permasalahan ketidaksesuaian (*mismatch*) keterampilan lulusan dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha dan industri juga menjadi sorotan publik.

Banyak faktor yang mendasari persoalan tersebut. Rendahnya keseriusan penyelenggara pendidikan dalam menangani persoalan dan tidak fokusnya pada upaya perbaikan menjadikan tujuan pendidikan belum terealisasi maksimal.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahjosumidjo (2011) bahwa kepala sekolah sangat berperan dalam peningkatan mutu sebuah lembaga pendidikan dengan melakukan pembinaan pada komponen sumber daya manusia, program pengajaran, sumber daya fisis, dan pembinaan relasi kerjasama antara sekolah dengan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya maksimal oleh kepala sekolah agar komponen-komponen tadi benar-benar mampu mendukung tujuan lembaga pendidikan, khususnya tujuan pendidikan SMK.

Beberapa temuan menunjukkan masih ada guru yang datang ke sekolah hanya pada waktu mengajar bahkan masih ditemukan guru yang tidak membuat perangkat pembelajaran (Wardiman, 1998). Hal ini masih sangat jauh dari harapan, dimana guru mampu mengintegrasikan proses pembelajaran dengan kebutuhan nyata peserta didiknya. Kenyataan ini menjelaskan bahwa masih lemahnya fungsi pengawasan (*controlling*) terhadap pelaksanaan proses pembelajaran oleh kepala sekolah (Vioretha, 2019). Permasalahan berikutnya adalah rendahnya kemampuan guru untuk mengambil peran dalam perkembangan IPTEK, karena saat ini pada umumnya bidang pekerjaan berkaitan dengan teknologi digital dan otomasi industri, dimana perangkat industri yang digunakan terintegrasi antara komputer dan *internet of things* (IOT) Mulder dalam Ta`ali et al (2019). Hal demikian tentu akan berdampak pada kualitas proses pembelajaran yang nantinya bermuara pada kualitas lulusannya. Oleh sebab itu, perlu menemukan dan menerapkan langkah-langkah nyata baik dari pemerintah yang mengeluarkan kebijakan ataupun dari lembaga pendidikan sebagai pelaksana kebijakan sehingga permasalahan dapat teratasi dan tujuan pendidikan SMK itu dapat diwujudkan.

Salah satu langkah konkrit pemerintah itu adalah dengan mengeluarkan kebijakan UUPT No. 12 tahun 2012 yang menjelaskan tentang pendidikan vokasi. Kebijakan pendidikan vokasi diambil sebagai bentuk tanggapan pemerintah terhadap perubahan globalisasi yang sedang terjadi. Era globalisasi ditandai dengan percepatan kemajuan teknologi dan informasi, sehingga mempengaruhi pola kehidupan masyarakat dari segala lini, tidak terkecuali pendidikan.

Pada pendidikan vokasi aspek kompetensi keterampilan (*skill*) lebih mendominasi dibandingkan aspek lainnya. Sehingga dalam kegiatan pembelajarannya pun mendominasi pendidikan dan pelatihan yang memaksimalkan kompetensi keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja (Bukit, 2014). Sukoco (2019) menjelaskan bahwa pendidikan vokasi mempersiapkan siswa untuk dapat bekerja sehingga perlu dibekali dengan kecakapan, keterampilan, dan prilaku kerja dalam mengapresiasi kebutuhan-

kebutuhan kerja yang ada pada dunia usaha. Secara definisi, pendidikan vokasi ataupun pendidikan kejuruan memiliki makna yang berbeda, tapi pada hakikatnya memiliki orientasi yang sama yaitu mempersiapkan lulusannya untuk dunia kerja ataupun dunia industri.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan SMK harus terus membenahi diri pada komponen sumber daya manusianya yaitu kepala sekolah dan guru, dan perlunya menguatkan hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat khususnya dunia usaha dan industri. SMK sebagai sekolah yang menerapkan pendidikan vokasi dapat menyesuaikan materi pelajaran dengan keahlian yang dibutuhkan dunia usaha dan industri, sehingga lulusan yang dihasilkan mampu berkompetisi dalam persaingan dunia kerja. Dengan demikian, sejatinya pendidikan vokasi pada SMK memberikan kontribusi terhadap kepuasan masyarakat akan kebutuhan tenaga-tenaga terampil untuk memajukan perekonomian melalui dunia usaha/ dunia industri.

Kebijakan pemerintah melalui pendidikan vokasi pada sekolah menengah kejuruan seharusnya diikuti dengan langkah nyata agar tujuan SMK dapat terealisasi. Optimalisasi tugas kepala sekolah dan guru menjadi faktor dominan dalam mewujudkan efektifitas pendidikan vokasi. Artikel ini menguraikan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah menengah kejuruan agar pendidikan vokasi dapat terselenggara dengan baik, sehingga kebijakan pemerintah dalam pendidikan vokasi berkontribusi efektif menyelesaikan masalah pendidikan khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis kritis melalui studi kepustakaan. Teknik kualitatif dipilih berdasarkan fakta bahwa teknik tersebut memberikan informasi yang komprehensif, orisinal dan mendasar tentang subjek studi (Moleong, 2014). Studi kepustakaan adalah kegiatan menelaah sumber dari buku, catatan, dan temuan-temuan penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal terkait permasalahan yang sedang dikaji kemudian menganalisisnya hingga menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Dasar analisis dalam kajian ini mengungkapkan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mendayagunakan potensi sumber daya manusia pada sebuah lembaga agar pendidikan vokasi efektif meningkatkan mutu lulusan sekolah kejuruan.

Tujuan penulisan artikel ini adalah memberikan ide/ pendapat/ gagasan pada usaha peningkatan proses pembelajaran melalui penggunaan model pembelajaran yang terintegrasi dengan pendidikan vokasi dan memaksimalkan peran kepala sekolah dalam menguatkan kerjasama sekolah dengan DUDI agar terjadi link and match sehingga pendidikan vokasi dapat terlaksana secara efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan

Konsep pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan yang ditempuh seseorang harus menjadikan manusia mandiri dan bertanggungjawab sehingga memiliki eksistensi diri. H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho (2008) mengungkapkan bahwa konsep pendidikan berorientasi pada hakikat manusia yaitu menjadikan manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia kreatif yang dapat diwujudkan dalam kebiasaannya dan dia mampu merekonstruksi kebiasaan/ budaya yang ada pada dirinya (Susilawati, 2021).

Manusia yang kreatif adalah manusia yang produktif serta adaptif dalam merespon perubahan. Hendratmoko et al (2017) mengungkapkan bahwa dalam konsep manusia merdeka terkandung kualitas sumber daya manusia yang menjadi tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri.

Tujuan pendidikan SMK adalah menyiapkan lulusannya agar aktif, produktif dan adaptif sehingga memiliki eksistensi diri dilingkungan masyarakat. Dengan demikian, konsep pendidikan yang

diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara sesuai dengan tujuan sekolah kejuruan. Maka dari itu diperlukan langkah-langkah strategis oleh lembaga pendidikan SMK sebagai pelaksana kebijakan untuk menentukan model yang sesuai dengan kondisi sekolah dan melaksanakan strategi pembelajaran yang menggerakkan siswanya untuk aktif, produktif dan adaptif.

Kebijakan Pendidikan

Kebijakan (*policy*) dapat diartikan seperangkat aturan sedangkan pendidikan (*education*) merupakan bidang yang ditunjuk. Jadi, kebijakan pendidikan bermakna seperangkat aturan yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan dapat diartikan keputusan yang diambil pemerintah untuk menindaklanjuti permasalahan pendidikan yang memberi dampak positif terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho (2008) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang digariskan dari visi dan misi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu.

Kebijakan pendidikan merupakan kunci keunggulan dan menjadi perhatian utama menyongsong era globalisasi (Olssen, M Codd J & O Neil, 2004). Dalam hal ini, kebijakan pendidikan merupakan fokus penting untuk mewujudkan masyarakat unggul, kompeten dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan zaman.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan seperangkat aturan pemerintah yang merumuskan strategi pelaksanaan pendidikan untuk menjawab tantangan zaman sebagai upaya mewujudkan tujuan pendidikan. Adapun langkah konkrit yang dapat ditempuh oleh lembaga pendidikan sebagai pelaksana kebijakan pendidikan adalah dengan menyusun strategi pelaksanaan proses pendidikan yang mengacu pada perbaikan mutu pendidikan. Pembelajaran yang bermutu adalah pembelajaran yang berdasarkan pada empat pilar pendidikan yang mengantarkan siswa untuk bisa mengetahui (*learning to know*), dapat melakukan (*learning to do*), dapat menjadi sesuatu (*learning to be*), dan bisa hidup bersama (*learning to live together*) (UNESCO).

Adapun ciri-ciri kebijakan pendidikan menjadi pembeda dengan kebijakan yang lain. Menurut Ali Imran (1995) dalam Madjid (2018) mengungkapkan ciri-ciri kebijakan pendidikan adalah: 1) Mempunyai tujuan, artinya supaya kebijakan pendidikan tersebut mempunyai arah dan berdampak positif dalam memajukan pendidikan, 2) Adanya aspek legal, maksudnya kebijakan tersebut memenuhi syarat konstitusi, 3) mempunyai konsep operasional, maksudnya memiliki panduan umum dan konsep yang jelas, yaitu memenuhi kriteria dibuat oleh yang berwenang (terdiri dari administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, dan politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan), dapat dievaluasi (digunakan untuk memilah dan memilih kebijakan yang baik dan mana kebijakan yang buruk sehingga perlu diganti), dan 4) adanya sistematika (dapat mengatur seluruh aspek dan tidak berbenturan dengan yang lain/ bersepadu dengan kebijakan lainnya).

Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi atau disebut juga pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mengedepankan output yang siap kerja. Pendidikan vokasi didasarkan pada keterampilan kerja sesuai dengan persyaratan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan serta kebutuhan lapangan kerja. Pelatihan vokasi ataupun kejuruan memerlukan rumusan faktual dan kontekstual berdasarkan konteks temporal dan spasial yang ada. Tujuan utama dari pendidikan vokasi atau kejuruan adalah untuk meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan terhadap kebutuhan dunia kerja untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan kompetitif. Pavlova (2009) menjelaskan bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan dengan tujuan utama mempersiapkan untuk bekerja dengan

menggunakan pendekatan berbasis kompetensi. Disimpulkan bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan terapan yang berorientasi pada kompetensi peserta didik agar memiliki keahlian sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Terdapat perbedaan antara pendidikan vokasi dan pendidikan kejuruan yaitu pada tingkat pendidikan. Pada prinsipnya memiliki orientasi yang sama, yaitu mempersiapkan lulusan yang siap kerja sesuai bidang keahlian. Dalam praktiknya, pendidikan vokasi memiliki program mendidik, melatih, dan melatih kembali. Program mendidik artinya program pendidikan vokasi harus mampu mendidik peserta didik mengembangkan keterampilan-keterampilan baru dan menyiapkan individu untuk lapangan pekerjaan baru. Program melatih dalam pendidikan vokasi berarti melatih individu sesuai dengan kompetensi strategis yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri. Sedangkan program melatih kembali ditujukan kepada individu yang telah bekerja untuk meningkatkan kemampuan/ kinerjanya karena adanya penggunaan alat-alat baru (Putu Sudira, 2012).

Miller (1994) dalam (Putu Sudira, 2012) mengungkapkan filosofi pendidikan vokasi sebagai *education for work* didasarkan atas filosofi *esensialisme*, *eksistensialisme*, dan *pragmatisme/matching*. Filosofi *esensialisme* menunjukkan peran pendidik dalam proses pembelajaran dengan melatih peserta didik untuk mengembangkan keterampilan/ skill, dan kebiasaan positif untuk mempengaruhi kepribadian mereka. Tujuan dari *esensialisme* ini adalah mendidik manusia bernilai guna dan bermakna, serta kompeten. Filosofi *eksistensialisme* menekankan pada eksistensi individu yang konkret/ nyata. Filosofi *pragmatisme/ matching* menunjukkan pada keterampilan atau kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan vokasi harus selaras dengan kebutuhan pekerjaan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan pendidikan vokasi menitikberatkan pada keterampilan/ kompetensi/ keahlian peserta didik melalui program mendidik, melatih dan melatih kembali, agar eksistensi peserta didik nyata keberadaannya ditengah masyarakat karena keahlian/ keterampilan yang dimilikinya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik itu dunia usaha ataupun industri.

Model Pembelajaran Terintegrasi Pendidikan Vokasi

Sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan pelaksana kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah. Bagaimanapun, efektifitas pendidikan vokasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana sekolah menyelenggarakan proses pembelajaran dengan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sehingga kualitas proses dan hasil dapat dicapai. Beberapa pendekatan proses pembelajaran yang dapat digunakan dan relevan dengan pendidikan vokasi adalah model pembelajaran yang berbasis kerja (*work based learning*) dan model pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik (*contextual teaching and learning*).

Studi penelitian dan evaluasi WBL menunjukkan adanya korelasi antara kinerja dan hasil lulusan dan struktur pembelajaran yang ditawarkan oleh sekolah dan industri dalam kehidupan kerja. Apabila tiga aspek ini terlaksana dengan optimal, yang kemudian disupport dengan kualitas pendidik maka akan berdampak positif bagi peningkatan hasil pendidikan itu sendiri. Menurut Bukit (2014), bentuk WBL yang dapat dikembangkan yaitu: 1) *company model/* magang (pendidikan tenaga kerja di perusahaan), 2) *school based/* pendidikan di sekolah (seluruh sistem yang terkait dilaksanakan di sekolah dan menjadi tanggung jawab pemerintah), 3) *Cooperative model* (gabungan *company model* dan *school based*) dan 4) *school based enterprise/* unit produksi (lingkungan sekolah menjadi tempat pengembangan usaha).

Adapun karakteristik dari pelaksanaan WBL adalah 1) adanya MOU antara lembaga pendidikan dengan organisasi usaha dan industri, 2) pelajar terlibat langsung sebagai pekerja, 3) skema pembelajaran disusun berdasarkan kebutuhan kerja, dan 4) program studi sebagai proyek yang

diintegrasikan ke dalam tugas (David Boud, 2001). Dari karakteristik WBL ini mengisyaratkan bahwa setting pembelajaran yang dialihkan ke tempat kerja memberikan kemudahan bagi siswa memahami apa yang sedang dipelajari karena berhadapan langsung dengan situasi nyata di tempat kerja.

Peserta didik akan mendapatkan pengalaman belajar pada dua tempat yaitu sekolah (non teknis) dan tempat kerja (teknis), sehingga dikatakan pembelajaran sistem ganda. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari model WBL terutama pada peningkatan kemampuan keterampilan baik itu keterampilan teknis ataupun keterampilan yang bersifat *human relationship*. Pengalaman belajar ditempat kerja memberikan pengetahuan yang komprehensif, memenuhi aspek kebutuhan belajar siswa kejuruan (Stephen Billet, 2001). Model WBL juga mampu menjawab empat pilar pendidikan yang diusung oleh UNESCO, yaitu *learning to know* dan *learning to do* untuk menjadi *learning to be*. Hasil penelitian (Siswanto, 2012) mengungkapkan adanya pengaruh yang signifikan penggunaan model WBL terhadap hasil belajar dan peningkatan pengetahuan serta sikap peserta didik. Dengan demikian, dapat disimpulkan model WBL dipandang relevan dengan pencapaian tujuan sekolah kejuruan.

Model pembelajaran Contextual teaching learning (CTL) menjadi alternatif pendekatan proses pembelajaran yang dapat dilakukan di sekolah kejuruan. Model ini menekankan kreatifitas guru dalam menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa sehingga siswa lebih mudah menginterpretasikan materi. Guru mengakumulasi pengetahuan dasar dan pengalaman siswa kemudian membuat desain pembelajaran yang menghubungkan kedua hal tersebut. Pada pembelajaran CTL, proses pembelajaran hanya terjadi apabila siswa mampu mengolah atau mengkonstruksi pengetahuan/ informasi yang mereka dapatkan sehingga pengetahuan tersebut memberi arti pada apa yang sedang mereka pelajari dan apa manfaat yang mereka peroleh (Kodir A, 2011). Siswa melakukan proses berpikir sesuai dengan konteks yang mereka miliki. Konteks itu bisa berupa lingkungan (sosial, budaya, fisik, budaya, psikologis) dan dari pengalaman mereka. Harapannya, dengan model pembelajaran CTL mampu membantu siswa dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

Prinsip dalam proses pembelajaran CTL adalah 1) saling terkait, dimana pengalaman belajar siswa merupakan rangkaian pengetahuan yang saling terkait satu dengan yang lain, sehingga siswa mampu menghubungkan antar pengetahuan tersebut menjadi suatu pemahaman yang baru. Pada kegiatan pembelajaran, prinsip saling terkait menjelaskan bahwa sesama peserta didik merasakan saling kebergantungan sehingga siswa butuh untuk bekerja sama dalam menyelesaikan suatu persoalan, 2) Differensiasi, dimana siswa menyadari keberagaman yang ada dilingkungan sekitarnya, yang kemudian merangsang siswa berpikir kritis dalam menemukan hubungan antar keragaman tersebut. Pada kegiatan pembelajaran, prinsip differensiasi memberi kebebasan kepada siswa untuk menelusuri minat dan bakat yang mempengaruhi cara belajarnya, 3) pengaturan diri, dimana siswa mampu mengatur, mempertahankan, melanjutkan apa yang disadarinya. Prinsip ini menantang siswa untuk mencapai potensi penuh mereka. Dia bertanggungjawab atas keputusan dan perilakunya sendiri, mengevaluasi alternatif, membuat keputusan, merencanakan, menganalisis informasi, menciptakan solusi, dan mengevaluasi bukti secara kritis (Agus Suprijono, 2009).

Model CTL membantu siswa mampu mengkonstruksi pemahamannya mengenai materi yang sedang dipelajari dengan cara menghubungkan materi dengan pengalaman sehari-hari (*relating*), mengeksplorasi/ menemukan pengetahuan (*eksplorating*), mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks kehidupannya (*applying*), membagi pengetahuan yang didapatkan kepada siswa yang lain (*cooperating*) sehingga diharapkan siswa memiliki keterampilan berkomunikasi efektif dan dapat bekerjasama dalam tim. Dengan demikian, model CTL dapat menumbuhkan potensi yang dimiliki siswa baik itu pengetahuan, sikap dan keterampilannya. Sedangkan model WBL lebih menekankan bagaimana mengembangkan potensi tersebut supaya berdaya guna dan berhasil guna atas potensi

yang dimilikinya tersebut.

Peran Pendidik dalam Pendidikan Vokasi

Secara umum pendidik adalah orang yang memiliki tanggungjawab memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada anak didiknya agar mampu beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Secara bahasa, pendidik merupakan orang yang memiliki kegiatan mendidik (Departemen Pendidikan Nasional, 2005). Menurut Abudin Nata (2010), pendidik adalah orang dewasa yang memberikan bantuan kepada anak didiknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai usianya baik itu jasmani ataupun rohani sehingga ia mampu mandiri menjalankan tugasnya sebagai makhluk Allah swt. Dalam UU RI No 12 Tahun 2005, pendidik (guru) adalah orang yang menjalankan tugas secara profesional untuk mendidik, membimbing, melatih, mengarahkan dan melaksanakan evaluasi terhadap anak didiknya. Dapat disimpulkan, pendidik merupakan seseorang yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mendidik, membimbing dan melatih anak didiknya menjadi manusia dewasa dan mandiri serta bertanggungjawab terhadap diri dan lingkungannya.

Peran guru dalam melaksanakan proses pembelajaran pada pendidikan vokasi/ kejuruan tidaklah sama dengan pendidikan menengah pada umumnya. Hal ini disebabkan karena faktor keterampilan lebih mendominasi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Agar program pendidikan vokasi berjalan dengan efektif, maka diperlukan strategi pembelajaran dengan konsep *learning how to learn* (mampu belajar bagaimana belajar) UNESCO. Konsep keterampilan *learning how to learn* mencegah hadirnya generasi yang tidak adaptif, gagap terhadap perubahan/ kemajuan teknologi .

Beberapa kegiatan pembelajaran yang dapat diciptakan oleh guru dalam konsep *learning how to learn* adalah 1) pembelajaran interaktif (terjadinya proses pembelajaran dengan komunikasi dua arah), 2) pembelajaran holistik (mengaitkan satu informasi dengan informasi lain dalam membangun konstruksi pengetahuan), 3) integratif (memadukan pengetahuan yang didapat dengan fakta yang ada atau keterampilan yang dimiliki), 4) saintifik (rancangan proses pembelajaran dengan mengonstruksi konsep melalui tahapan metode ilmiah), 5) kontekstual (disebut CTL, dimana siswa menemukan jawaban permasalahan yang dihadapi dengan memahami konteks kehidupan), 6) tematik (menggabungkan suatu materi dengan materi lain dalam satu tema), 7) efektif (menciptakan pembelajaran yang bermutu), 8) kolaboratif (berkaitan dengan proses peserta didik bekerja sama dalam mempelajari materi pelajaran), 9) berpusat pada peserta didik (guru hanya sebagai fasilitator dan membimbing siswa agar proses pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa).

Pengaruh kesiapan lembaga beserta elemen-elemen yang ada didalamnya berdampak pada efektifitas kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah sebagai pemimpin memiliki pengaruh besar atas mutu lulusan yang kemudian juga berdampak pada mutu lembaga yang dipimpinya. Dalam hal ini diperlukan upaya optimal dari kepala sekolah untuk membangun kerjasama efektif dengan dunia usaha dan industri melalui model WBL (*Work Based Learning*). Kerjasama yang berfokus pada target capaian peserta didik dan tidak sebagai pelengkap administrasi saja. Disamping itu, pengembangan kemampuan guru kejuruan dibidang IT juga diperlukan agar bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi terutama yang berkaitan dengan perkembangan ilmu dibidang kejuruan. Oleh karena itu, pelatihan guru kejuruan perlu terus di-*upgrade* dan *update* guna perbaikan mutu pembelajaran.

SIMPULAN

Pendidikan dalam konsep Kihajar Dewantara beorientasi pada terwujudnya manusia mandiri dan bertanggungjawab sehingga memiliki eksistensi diri. Pada perkembangannya konsep pendidikan mengembalikan manusia pada hakikatnya, yaitu menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang kreatif dan produktif.

Kebijakan pendidikan merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan yang mampu mengakomodir masalah pendidikan. Dalam upayanya mewujudkan tujuan pendidikan diperlukan strategi yang mengacu pada perbaikan mutu pembelajaran.

Pendidikan vokasi/ kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan lulusannya untuk mandiri dan siap kerja. Tujuan pendidikan vokasi adalah untuk meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan terhadap kebutuhan dunia kerja sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera dan kompetitif. Filosofi dalam pendidikan vokasi adalah *esensialisme*, *eksistensialisme*, dan *matching*.

Model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pendidikan vokasi adalah *work based learning* (WBL) dan *Contextual Teaching and Learning* (CTL). Bentuk WBL dapat dikembangkan menjadi *company model*, *school based*, *cooperative model*, dan *school based enterprise*. Karakteristik WBL 1) adanya MOU antara lembaga pendidikan dengan organisasi usaha dan industri, 2) pelajar terlibat langsung sebagai pekerja, 3) skema pembelajaran disusun berdasarkan kebutuhan kerja, dan 4) program studi sebagai proyek yang diintegrasikan ke dalam tugas sekolah.

Pembelajaran model CTL merupakan pembelajaran yang membimbing siswa untuk mampu mengolah atau mengkonstruksi pengetahuan/ informasi yang mereka dapatkan sehingga pengetahuan tersebut memberi arti pada apa yang sedang mereka pelajari dan apa manfaat yang mereka peroleh. Prinsip pembelajaran CTL adalah adanya saling keterkaitan antar pengetahuan yang ada, differensiasi, dan pengaturan diri.

Peran guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mendukung kemampuan keterampilan siswa agar relevan dengan kebutuhan dunia industri adalah dengan menyajikan pembelajaran yang berkonsep *learning how to learn*. Kegiatan pembelajaran dalam konsep *learning how to learn* membimbing siswa untuk lebih aktif, komunikatif, mandiri dan adaptif. Kegiatan pembelajaran yang mencakup dalam *learning how to learn*, adalah kegiatan pembelajaran yang interaktif, holistik, tematik, kontekstual, kolaboratif, saintifik, efektif dan integratif serta berpusat kepada siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abudin Nata. (2010). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Agus Suprijono. (2009). *Cooverative Learning(Teori dan Aplikasi Paikem)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bukit, M. (2014). *Srategi dan Inovasi Pendidikan Kejuruan*. Bandung: Alfa Beta.
- David Boud, S. N. (2001). *Work-based learning a new higher education?* London: SRHE and Open University Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- DR Abd Madjid. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hendratmoko, T., Kuswandi, D., & Setyosari, P. (2017). Tujuan Pembelajaran Berlandaskan Konsep Pendidikan Jiwa Merdeka Ki Hajar Dewantara. *Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pembelajaran*, 3(2), 152–157.
- Kodir A. (2011). *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Kusnandar, V. B. (2021). *Pengangguran di Indonesia Paling Banyak Lulusan SMK..* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/24>

- Moleong, L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Olssen, M Codd J & O Neil, M. (2004). *Educational Policy: Globalization, Citizenship, and Democracy*. London: Sage Publications, Inc.
- Pavlova, M. (2009). *Technologi and Vocational Education for Sustainable Development: Empowering Individuals for the Future*. New York: Springer.
- Putu Sudira. (2012). *Filosofi dan Teori Pendidikan Vokasi dan Kejuruan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Siswanto, B. T. (2012). Pengaruh Model Penyelenggaraan Work-Based Learning Rolling Terpadu Terhadap Aspek-Aspek Kualitas Hasil Belajar. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 21(1), 67–73.
- Stephen Billet. (2001). *Learning In the Workplace: Strategies For Effectives Practice*. London: Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003116318>
- Sukoco, J. B., Kurniawati, N. I., Werdani, R. E., & Windriya, A. (2019). Pemahaman Pendidikan Vokasi Di Jenjang Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 1(1), 23–26.
- Susilawati, N. (2021). Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme. *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3), 203–219.
- Ta`ali, T., Mawardi, A., & Yanto, D. T. P. (2019). Pelatihan PLC dan Elektropneumatik untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru SMK Bidang Ketenagalistrikan: Pendekatan Revolusi Industri 4.0. *JTEV (Jurnal Teknik Elektro Dan Vokasional)*, 5(2), 88. <https://doi.org/10.24036/jtev.v5i2.106722>
- Vioretha, N. (2019). Peran Kepala Sekolah dan Pengawas Sebagai Supervisor Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. *INA-Rxiv Papers*, 1–3. <https://doi.org/https://doi.org/10.31227/osf.io/h6guw>
- Wahjosumidjo. (2011). *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wardiman Djojonegoro. (1998). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*. Yogyakarta: PT Yogyakarta Agung Offset.